Katalog: 9201001.8202

INDIKATOR EKONOMI

2017

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

INDIKATOR EKONOMI

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

Indikator Ekonomi Halmahera Tengah 2017

ISBN: 978-602-662-129-0
No. Publikasi: 82020.1819
Katalog: 9201001.8202

Ukuran Buku: 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman: 53 + viii halaman

Naskah:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Penyunting:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Desain Kover:
Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Ilustrasi Kover:
-

Sumber Ilustrasi:
-

Diterbitkan oleh:
© BPS Kabupaten Halmahera Tengah

Dicetak oleh : -

TIM PENYUSUN

Indikator Ekonomi Halmahera Tengah 2017

Pengarah :
Iwan Fajar Prasetyawan, SST, M.Si

Penanggung Jawab Umum :
Iwan Fajar Prasetyawan, SST, M.Si

Penanggung Jawab Teknis :
Iwan Fajar Prasetyawan, SST, M.Si

Penyunting :
Harjuni Ariska, SST

Penulis :
Faiszal Faqih Bachtiar, SST

Pengolah Data :
Faiszal Faqih Bachtiar, SST

Desain :
Faiszal Faqih Bachtiar, SST

KATA PENGANTAR

Buku Indikator Ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah 2017 ini adalah kelanjutan dari publikasi sebelumnya yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Halmahera Tengah.

Publikasi ini bertujuan antara lain untuk melihat perkembangan perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah dari tahun ke tahun dengan harapan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi dalam merumuskan berbagai kebijakan dan program, khususnya di bidang ekonomi.

Data yang disajikan dalam publikasi ini berupa tabel-tabel perkembangan harga, keuangan daerah, produksi, dan pendapatan regional serta potensi wisata. Bahan-bahannya dikumpulkan dan diolah oleh BPS Kabupaten Halmahera Tengah dan sebagian diantaranya merupakan data sekunder yang diperoleh dari dinas-dinas terkait.

Saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan publikasi selanjutnya. Semoga publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi pengguna data khususnya pemerhati masalah perekonomian.

Weda, Desember 2018

Kepala Badan Pusat Statistik

Kabupaten Halmahera Tengah

Iwan Fajar Prasetyawan, SST.,M.Si

NIP. 19800628 200212 1 003

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB 1
Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan suatu daerah dilaksanakan dengan tujuan menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik. Kabupaten Halmahera Tengah merupakan kabupaten lama dengan ibukota kabupatennya terletak di Kota Tidore Kepulauan, dan pada tahun 2003 mengalami pemekaran menjadi dua kabupaten dan satu kota yaitu Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan. Setelah pemekaran, ibukota Kabupaten Halmahera Tengah pindah ke Kota Weda yang notabene merupakan kota baru. Hal ini menyebabkan pembangunan menjadi hal mutlak untuk digalakan, baik pembangunan fisik wilayahnya maupun pembangunan sumber daya manusianya.

Setiap pembangunan harus selalu diawali dengan suatu perencanaan. Dalam menyusun suatu perencanaan diperlukan informasi yang tidak saja harus lengkap, tetapi juga harus akurat dan tepat. Karena tanpa data, perencanaan yang disusun akan memuat berbagai ketidak pastian dan resiko yang besar.

Peran penting data/informasi dalam perencanaan suatu pembangunan daerah mutlak diperlukan agar arah pembangunan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Selain hal tersebut di atas, data maupun informasi dapat juga digunakan sebagai evaluasi keberhasilan dari pembangunan suatu daerah baik secara mikro maupun makro.

Indikator Ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017 merupakan kumpulan data statistik yang diharapkan mampu memberikan gambaran sampai sejauh mana keberhasilan atau perkembangan perekonomian masyarakat Halmahera Tengah telah dicapai. Publikasi ini disusun berdasarkan data-data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait dan juga survei yang telah dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan publikasi Indikator Ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah 2017 adalah menyajikan data statistik ekonomi yang lengkap sehingga bermanfaat sebagai dasar penyusunan dan perumusan kebijakan yang akan diambil, serta digunakan untuk penyusunan perencanaan pembangunan yang lebih tepat dan terarah serta sebagai bahan evaluasi dari kebijakan yang telah dilaksanakan maupun hasil yang telah dicapai.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Buku ini ditulis menjadi tujuh bab. Bab pertama yaitu pendahuluan, yang berisi pengenalan tentang Indikator Ekonomi. Bab kedua membahas neraca keuangan (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Halmahera Tengah. Bab berikutnya berisi tentang Indeks Kemahalan Konstruksi dan Inflasi Halmahera Tengah.

Bab keempat membahas tentang keuangan daerah dan perbankan. Didalam keuangan daerah, dijelaskan tentang bagaimana realisasi keuangan Halmahera Tengah selama satu tahun, meliputi pendapatan dan pengeluaran.

Bab kelima berisi tentang produksi pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan serta kehutanan. Bab keenam membahas tentang potensi wisata Kabupaten Halmahera Tengah yang dapat dikembangkan serta jasa akomodasi sebagai penunjang kegiatan wisata. Bab terakhir membahas tentang perkembangan transportasi di Kabupaten Halmahera Tengah.

BAB 2
Produk Domestik Regional Bruto

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan perkembangan nila tambah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh masing-masing sektor ekonomi dalam suatu kurun waktu di wilayah tertentu. Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB merupakan alat atau pendekatan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi.

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam *System of National Accounts* 2008 (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka Supply and Use Tables (SUT).

Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.

Ada dua macam penghitungan PDRB, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nila tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada kurun waktu tersebut, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar (tahun 2010) yang selanjutnya disebut sebagai tahun dasar.

PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat distribusi dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan sebagai pendekatan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2017 mengalami perlambatan jika dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2017 sebesar 5,97 persen. Perlambatan

pertumbuhan perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah masih menjadi pencapaian yang baik melihat kondisi perekonomian di dunia dan Indonesia sedang tidak dalam kondisi prima. Secara nasional pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 sebesar 5,07 persen masih di bawah target yang sebesar 5,2 persen. Kondisi perekonomian global yang tidak pasti ditengarai menjadi salah satu penyebab lesunya perekonomian nasional. Jika dilihat dalam skala provinsi Maluku Utara kondisi perekonomian Kabupaten/Kota di Maluku Utara memiliki pertumbuhan pada kisaran lima persen.

Tabel 1. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Lima Lapangan Usaha Halmahera Tengah (persen), 2013–2017

No	**Lapangan Usaha**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016***	**2017****
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertambang-an dan Penggalian	2,2	-28,47	-3,96	1,42	10,66
2	Industri Pengolahan	6,99	8,56	5,36	280,01	12,83
3	Pengadaan Listrik dan Gas	10,73	17,62	17,82	24,63	8,21
4	Transportasi dan Pergudangan	6,87	8,26	8,55	4,32	8,93
5	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,83	2,42	2,47	3,34	8,68
6	**PDRB**	**5,29**	**-1,9**	**4,34**	**11,24**	**5,97**

* Angka sementara
** Angka sangat sementara

Sumber : Publikasi PDRB Lapangan Usaha Halmahera Tengah 2017

Pada tahun 2017 kategori industri pengolahan mencapai pertumbuhan tertinggi bila dibandingkan kategori lainnya yaitu sebesar 12,83 persen. Pertumbuhan ini diantaranya disebabkan oleh sudah

beroperasinya *Smelter* untuk mengolah biji nikel yang telah ditambang pada perusahaan pertambangan di Kecamatan Pulau Gebe, kemudian hasilnya diekspor keluar negeri. Masih terdapat 2 *smelter* yang sedang dibangun, yaitu di Kecamatan Weda Tengah. Sementara itu, sumbangan kenaikan subsektor penggalian diperoleh dari permintaan akan bahan galian batu dan pasir yang tinggi dikarenakan pembangunan infrastruktur di Halmahera Tengah.

Seluruh kategori mengalami pertumbuhan positif, berturut-turut tiga lapangan usaha yang tertinggi pertumbuhannya adalah Industri Pengolahan, Pertambangan dan Penggalian, Transportasi dan pergudangan. Adapun kategori lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang positif di atas dua persen. Hanya jasa keuangan dan asuransi yang memiliki nilai pertumbuhan di bawah dua persen pada tahun 2017 yakni sebesar 1,67 persen. Kondisi pertumbuhan di lapangan usaha yang lain yakni di antaranya kategori pertanian, kehutanan dan perikanan mencatat sebesar 2,51 persen, kategori industri pengolahan sebesar 12,83 persen, kategori pengadaan listrik dan gas sebesar 8,21 persen, kategori pengadaan air sebesar 3,74 persen, kategori konstruksi sebesar 7,28 persen, kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 5,44 persen, kategori transportasi dan pergudangan sebesar 8,93 persen, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,68 persen, kategori informasi dan komunikasi 6,77 persen, kategori jasa keuangan dan asuransi sebesar 1,67 persen, kategori *real estate* sebesar 3,18 persen, kategori jasa perusahaan sebesar 5,88 persen, kategori adminstrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 2,48 persen, kategori jasa pendidikan sebesar 7,72 persen, kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 6,85 persen, dan kategori jasa lainnya sebesar 4,67 persen.

Struktur ekonomi suatu wilayah dapat dilihat melalui besarnya peranan masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB. Indikator ini merupakan informasi penting untuk mengetahui kategori lapangan usaha yang merupakan penopang utama perekonomian di suatu wilayah.

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah bertumpu pada sektor pertambangan dan sektor pertanian yang terlihat dari besarnya peranan masing-masing kategori ini terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah. Sumbangan terbesar pada tahun 2017 dihasilkan oleh kategori

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yakni sebesar 24,34 persen dari total PDRB ADHB 2017. Berikut tabel yang memuat *share* nilai tambah dari beberapa lapangan usaha terhadap PDRB Halmaahera tengah pada tabel 2.

Tabel 2. Distribusi PDRB dalam Lapangan Usaha (Persentase/%)

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,94	26,94	26,71	25,46	24,34
B	Pertambangan dan Penggalian	25,12	17,50	15,10	13,79	15,42
C	Industri Pengolahan	2,49	2,69	2,70	8,41	8,91
F	Konstruksi	7,19	7,89	8,19	7,74	7,87
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,34	14,96	15,93	14,96	14,88
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	17,82	20,03	21,17	19,92	18,80
Lapangan Usaha Lainnya		9,10	9,99	10,20	9,71	9,77
Total		100	100	100	100	100

Sumber : Publikasi PDRB Halmahera Tengah menurut Lapangan Usaha 2017

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator kesejahteraan rakyat, dimana pendapatan perkapita ini dapat didekati dengan PDRB Per kapita. Walaupun demikian, PDRB per kapita ini juga tidak secara langsung dapat mencerminkan tingkat

kesejahteraan/kemakmuran suatu kelompok masyarakat. Oleh karena PDRB per kapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduk di daerah tersebut, maka PDRB per kapita sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya dua variabel tersebut. Dengan kata lain, jika nilai PDRB besar sedangkan jumlah penduduknya sedikit maka PDRB per kapitanya akan menjadi besar, sebaliknya apabila nilai PDRB kecil sedangkan jumlah penduduknya besar maka PDRB per kapitanya akan menjadi kecil.

Tabel 3. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2013-2017

Uraian	**2013**	**2014**	**2015**	**2016***	**2017****
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB perkapita (Juta Rp) - ADHB	28,65	28,94	30,99	34,47	36,57
- ADHK 2010	23,54	22,46	22,78	24,59	25,32
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	2,24	(4,61)	1,42	7,96	2,96
Jumlah penduduk (000 org)	47 079	48 414	49 807	51 315	52 813

Sumber : Publikasi PDRB Halmahera Tengah menurut Pengeluaran 2017

Pada tahun 2017, PDRB per kapita Kabupaten Halmahera Tengah mencapai 36,57 juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar 2,96 persen. Berdasarkan atas dasar harga konstan (ADHK), PDRB per kapita Kabupaten Halmahera Tengah 2017 sebesar 25,32 juta rupiah.

Selain penghitungan menurut berbagai sektor di lapangan usaha, PDRB juga dihitung menurut komponen pengeluarannya yaitu :

1. Pengeluaran Komponen Rumah Tangga
2. Pengeluaran Komponen LNPRT
3. Pengeluaran Komponen Pemerintah
4. Perubahan Inventor dan PMTB
5. Net Ekspor (Ekspor-Impor)

Gambar .1. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Halmahera Tengah 2013-2017
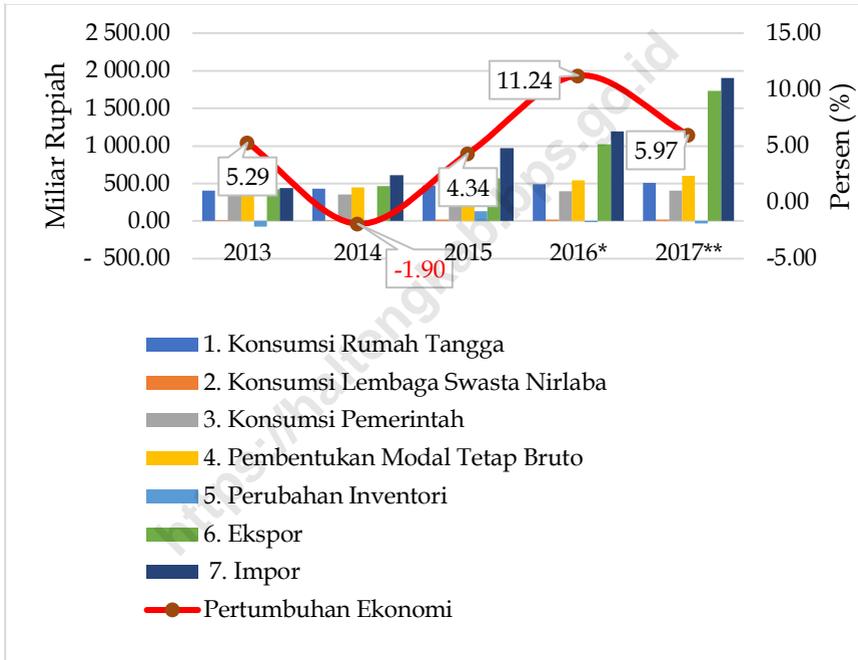
Sumber: PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran Tahun 2017

Mulai dari tahun 2015 samapi 2017 perkembangan nilai ekspor dan impor di Halmahera Tengah terlihat tumbuh positif dengan baik. Ekspor selalu diimbangi dengan nilai impor yang lebih tinggi. Hal ini tentunya akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang baik dengan adanya pengelolaan secara efektif efisien oleh pemertintah maupun berbagai *stakeholder* terkait dalam menangani kekayaan alam berupa mineral yang ada di Halmahera Tengah.

BAB 3
Indeks Kemahalan Konstruksi dan Inflasi

A. INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI

Penerapan kebijakan otonomi daerah pada tahun 2000 dimaksudkan untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di semua daerah. Dengan kebijakan otonomi daerah ini diharapkan terjadinya pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sehingga tujuan nasional dapat tercapai yaitu masyarakat sejahtera dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Terdapat salah satu dana perimbangan yang disebut Dana Alokasi Umum (DAU), dimana pengertiannya adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan instrumen transfer yang dimaksudkan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah. Ada beberapa komponen dalam perumusan Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia (IPM), luas wilayah, PDRB per kapita, dan indeks kemahalan konstruksi (IKK).

IKK digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), karenanya, didasarkan atas suatu pendekatan atau kompromi tertentu. Misalnya yang menjadi objek adalah bangunan tempat tinggal, maka bangunan tempat tinggal tersebut harus mengakomodir berbagai macam rancangan dan model. Untuk menghitung Indeks Kemahalan Konstruksi dibutuhkan beberapa komponen data yaitu data harga konstruksi yang meliputi harga bahan bangunan/ konstruksi, harga sewa alat berat konstruksi, upah jasa konstruksi, dan data bobot/diagram timbang umum IKK kabupaten/kota berupa nilai masing-masing bahan bangunan utama yang dibutuhkan untuk membangun 1 unit bangunan per satuan ukuran luas dari 5 kelompok jenis bangunan.

Sebagaimana diketahui bahwa IKK sudah dihitung sejak tahun 2003. Penimbang yang digunakan untuk menghitung IKK adalah BoQ tahun 2003. Perkembangan teknik sipil sangat cepat ditambah lagi dengan pesatnya industri bahan bangunan. Saat ini material yang digunakan untuk kegiatan konstruksi sudah banyak yang berubah atau muncul model baru seperti batako ringan, atap baja ringan dan kusen

aluminium. Peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah yang mempengaruhi kegiatan konstruksi juga banyak berubah. Beberapa hal tersebut mengakibatkan BoQ 2003 yang selama ini digunakan untuk menghitung IKK tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, mulai tahun 2017 ini, penghitungan IKK sudah menggunakan BoQ terbaru yang dikumpulkan pada tahun 2012 dan *updating* BoQ sampai tahun 2017.

Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, IKK tahun 2017 menggunakan penimbang yang lebih lengkap dan *up to date* dengan menggunakan BoQ tahun 2012 dan *updating* BoQ tahun 2016.

IKK tahun 2017 menggunakan data harga komoditi konstruksi, sewa alat berat dan upah jasa konstruksi yang dikumpulkan dalam 4 periode pencacahan yaitu Juli 2016, Oktober 2016, Januari 2017, dan April 2017. Seperti halnya IKK tahun 2016, IKK tahun 2017 menggunakan 4 periode pencacahan dikarenakan periode tersebut mencakup masa perencanaan dan pembangunan suatu proyek konstruksi. Periode pencacahan tersebut mencakup masa perencanaan dan pembangunan suatu proyek konstruksi, sehingga lebih menggambarkan fluktuasi harga di bidang konstruksi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya menggunakan dua periode pencacahan.

Pengumpulan data harga di sektor konstruksi menggunakan pendekatan *Basket of Construction Components (BOCC).* Metode pendekatan ini didesain untuk tujuan perbandingan antar wilayah. Data harga yang dikumpulkan terdiri dari komponen konstruksi utama dan input dasar yang umum dalam suatu wilayah.

Komponen konstruksi adalah output fisik konstruksi yang diproduksi sebagai tahap *intermediate* dalam proyek konstruksi. Elemen kunci dalam proses pendekatan ini adalah semua harga yang diestimasi berhubungan dengan komponen yang dipasang, termasuk biaya material, tenaga kerja, dan peralatan. Tujuan penggunaan pendekatan BOCC adalah memberikan perbandingan harga konstruksi yang lebih sederhana dan biaya yang murah dan memungkinkan menggunakan metode *Bill of Quantity (BoQ).*

Pendekatan BOCC didasarkan pada harga 2 jenis komponen, yakni komponen gabungan dan input dasar. Selanjutnya untuk tujuan estimasi perbandingan antar wilayah, komponen-komponen tersebut

dikelompokan dalam bentuk sistem-sistem konstruksi. Sistem-sistem tersebut selajutnya dikelompokkan ke dalam *basic heading*.

Sektor konstruksi diklasifikasikan ke dalam 3 kategori yang disebut sebagai *basic heading* yaitu:

a. Gedung Bangunan

b. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

c. Bangunan Lainnya

Gedung dan bangunan yang termasuk dalam lingkup penghitungan diagram timbang IKK adalah sebagai berikut:

1. Konstruksi gedung tempat tinggal, meliputi: rumah yang dibangun sendiri, *real estate*, rumah susun, dan perumahan dinas.
2. Konstruksi gedung bukan tempat tinggal, meliputi: konstruksi gedung perkantoran, industri, kesehatan, pendidikan, tempat hiburan, tempat ibadah, terminal/stasiun dan bangunan monumental.

Klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan yang termasuk dalam penghitungan diagram timbang adalah sebagai berikut:

1. Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian
   a. Bangunan pengairan, meliputi: pembangunan waduk *(reservoir)*, bendungan*(weir),* embung, jaringan irigasi, pintu air, sipon dan drainase irigasi, talang, *check dam*, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, *krib*, dan *viaduk*.
   b. Bangunan tempat proses hasil pertanian, meliputi: bangunan penggilingan, dan bangunan pengeringan.
2. Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan
   a. Bangunan jalan, jembatan, landasan pesawat terbang, pagar/tembok, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu lalu lintas.
   b. Bangunan jalan dan jembatan kereta meliputi pembangunan jalan dan jembatan kereta.
   c. Bangunan dermaga, meliputi: pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan dermaga/pelabuhan, sarana pelabuhan, dan penahan gelombang.
3. Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi
   a. Bangunan elektrikal, meliputi: pembangkit tenaga listrik, transmisi dan transmisi tegangan tinggi.

b. Konstruksi telekomunikasi udara, meliputi: konstruksi bangunan telekomunikasi dan navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, dan bangunan antena.
c. Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api, meliputi: pembangunan konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api.
d. Konstruksi sentral telekomunikasi, meliputi: bangunan sentral telefon/telegraf, konstruksi bangunan menara pemancar/penerima radar *microwave*, dan bangunan stasiun bumi kecil/stasiun satelit.
e. Instalasi air, meliputi: instalasi air bersih dan air limbah dan saluran drainase pada gedung.
f. Instalasi listrik, meliputi: pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan lemah dan pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan kuat.
g. Instalasi gas, meliputi: pemasangan instalasi gas pada gedung tempat tinggal dan pemasangan instalasi gas pada gedung bukan tempat tinggal.
h. Instalasi listrik jalan, meliputi: instalasi listrik jalan raya, instalasi listrik jalan kereta api, dan instalasi listrik lapangan udara.
i. Instalasi jaringan pipa, meliputi: jaringan pipa gas, jaringan air, dan jaringan minyak.

Sedangkan jenis bangunan yang tercakup dalam klasifikasi bangunan lainnya adalah sebagai berikut: bangunan terowongan, bangunan sipil lainnya (lapangan olahraga, lapangan parkir, dan sarana lingkungan pemukiman), pemasangan perancah, pemasangan bangunan konstruksi prefab dan pemasangan kerangka baja, pengerukan, konstruksi khusus lainnya, instalasi jaringan pipa, instalasi bangunan sipil lainnya, dekorasi eksterior, serta bangunan sipil lainnya termasuk peningkatan mutu tanah melalui pengeringan dan pengerukan.

Tabel 4. Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tengah Tahun 2017

	Kabupaten/ Kota	IKK
	(1)	*(2)*
1.	**Kabupaten Halmahera Barat**	123,44
2.	**Kabupaten Halmahera Tengah**	128,01
3.	**Kabupaten Kepulauan Sula**	124,53
4.	**Kabupaten Halmahera Selatan**	109,31
5.	**Kabupaten Halmahera Utara**	111,30
6.	**Kabupaten Halmahera Timur**	118,52
7.	**Kabupaten Pulau Morotai**	109,84
8.	**Kabupaten Pulau Taliabu**	120,19
9.	**Kota Ternate**	129,46
10.	**Kota Tidore Kepulauan**	123,39

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Secara umum pada tahun 2017, IKK Kabupaten Halmahera Tengah yakni sebesar 128,01 menempati posisi ke-2 tertinggi setelah Kota Ternate, Secara implisit, hal ini menggambarkan bahwa secara umum, harga barang-barang konstruksi yang dibutuhkan untuk membangun satu unit bangunan per satuan ukuran luas di Kabupaten Halmahera Tengah paling tinggi apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya. Hal ini tentunya bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam hal perencanaan pembangunan sarana dan prasarana fisik, bagi usaha sektor perdagangan bahan konstruksi serta bagi pelaku usaha sektor konstruksi di Kabupaten Halmahera Tengah.

Banyak faktor yang memengaruhi harga barang dan jasa di suatu wilayah. Selain sisi permintaan dan penawaran, juga terdapat faktor lain seperti jumlah pedagang besar di suatu kota, kondisi jalan yang mempengaruhi jalur distribusi, jarak ke tempat asal barang, dan lain-lain.

Paket komoditas dapat dikategorikan menjadi barang alam/natural dan barang pabrikan. Dilihat dari harga rata-rata Provinsi Maluku Utara, harga barang natural seperti pasir, batu, papan, balok, dan batu split Kabupaten Halmahera Tengah relatif murah sedangkan untuk barang pabrikan seperti tripleks, cat, aspal, kaca, dan sebagainya relatif mahal. Barang pabrikan relatif mahal karena berasal dari luar Maluku Utara, yaitu Surabaya, Manado, dan Makassar.

B. INFLASI

Indeks Harga Konsumen (IHK) digunakan untuk mengukur tingkat inflasi/deflasi di suatu negara atau kota dengan menghitung besarnya perubahan IHK suatu bulan tertentu terhadap bulan sebelumnya yang dinyatakan dalam persen.

IHK terdiri dari IHK Perkotaan dan IHK Perdesaan. IHK Perkotaan menggambarkan perubahan harga secara umum dari sejumlah (paket) komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga di daerah perkotaan. IHK Perdesaan menggambarkan perubahan harga secara umum dari sejumlah (paket) komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga di daerah perdesaan (level kabupaten). Paket komoditas yang digunakan dalam menyusun IHK diperoleh dari suatu survei pengeluaran rumah tangga yang biasa disebut Survei Biaya Hidup (SBH).

Sejarah penghitungan laju inflasi di Indonesia diawali dengan Indeks Biaya Hidup (IBH). IBH digunakan di Indonesia sebagai indikator inflasi sejak tahun 1950-an. IBH dihitung berdasarkan perkembangan harga-harga kebutuhan rumah tangga di Jakarta yang berdasarkan paket komoditas sebanyak 62 jenis barang dan jasa hasil SBH yang dilaksanakan tahun 1957-1958. IBH Jakarta dengan dasar Maret 1957-Pebruari 1958=100 dihitung dan digunakan sebagai indikator adanya laju inflasi hingga Maret 1979.

Mulai April 1979 IBH diganti dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dihitung berdasarkan paket komoditas (sekitar 100-110 jenis barang/jasa) hasil SBH yang dilaksanakan di 17 ibukota provinsi. IHK tersebut dihitung dengan dasar April 1977-Maret 1978=100. Ketujuh belas ibukota provinsi tersebut adalah Medan, Padang, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Mataram, Kupang, Ujung pandang, Manado, Pontianak, Banjarmasin, Ambon, Jayapura.

Pada tahun 1988/1989 BPS menyelenggarakan SBH di seluruh ibukota provinsi di Indonesia. Tujuan utamanya adalah memperoleh diagram timbangan (paket komoditas) baru untuk memperbaharui penghitungan IHK 17 kota. IHK dengan dasar April 1988/Maret 1989=100, mulai digunakan sejak April 1990, mencakup 27 ibukota provinsi dengan paket komoditas sekitar 200-224 jenis barang dan jasa.

Pertumbuhan perekonomian Indonesia dalam dasawarsa tahun 90-an yang begitu pesat berdampak pada pendapatan perkapita masyarakat yang meningkat cukup drastis sehingga mengakibatkan pola konsumsi rumahtangga hasil SBH 1988/1989 tersebut telah berubah. Oleh karena itu BPS memandang perlu untuk mengadakan SBH yang baru guna mempengaruhi perhitungan IHK, yaitu dengan melaksanakan SBH selama tahun 1996 dan disebut SBH96.

Sejak tahun 1998 perhitungan IHK 43 kota di Indonesia menggunakan tahun dasar 1996 (hasil SBH/SBH Tahun 1996 di 43 kota), dimana perhitungan IHK pada tahun sebelumnya menggunakan tahun dasar 1988/1989 (SBH 1988/1989 di 27 Ibu Kota Provinsi). Sedangkan SBH yang terakhir dilaksanakan adalah pada tahun 2007 guna mempersiapkan penggantian tahun dasar yang baru (2007=100) yang dilaksanakan di 33 Ibu Kota Provinsi dan 33 Kabupaten, dimana di antaranya terdapat 21 kota IHK yang baru. SBH 2007 dilaksanakan di 66 kota yang dilakukan di daerah perkotaan dengan sampel sebanyak 115.830 rumah tangga. Adapun pengukuran laju inflasi dengan menggunakan tahun dasar baru yaitu IHK (2007 = 100), mulai digunakan sejak Juni 2008. Dalam penyajian IHK 2007, jumlah kelompok/sub kelompok yang disajikan tetap terdiri dari 7 (tujuh) kelompok dan 35 sub kelompok.

Mulai Januari 2014, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2012 = 100. Ada beberapa perubahan yang mendasar dalam penghitungan IHK baru (2012=100) dibandingkan IHK lama (2007=100), khususnya mengenai cakupan kota, paket komoditas, dan diagram timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2012 yang dilaksanakan oleh BPS, yang merupakan salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK. Hasil SBH 2012 sekaligus mencerminkan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat dibandingkan dengan hasil SBH sebelumnya.

SBH 2012 dilaksanakan di 82 kota, yang terdiri dari 33 ibukota provinsi dan 49 kota besar lainnya. Dari 82 kota tersebut, 66 kota merupakan cakupan kota SBH lama dan 16 merupakan kota baru. Survei ini hanya dilakukan di daerah perkotaan (urban area) dengan total sampel sebanyak 13.608 Blok Sensus dan total sampel rumah tangga sebanyak 136.080. SBH 2012 dilaksanakan secara triwulanan selama tahun 2012 sehingga setiap triwulan terdapat 34.020 sampel rumah tangga. Paket komoditas nasional hasil SBH 2012 terdiri dari 859 komoditas. Paket komoditas terbanyak ada di Jakarta yaitu 462 komoditas, dan yang paling sedikit di Singaraja sebanyak 225 komoditas. Jumlah paket komoditas kelompok inflasi inti (*core*) sebanyak 751 komoditas, kelompok inflasi harga yang diatur pemerintah (*administered prices*) sebanyak 23 komoditas, dan kelompok inflasi bergejolak (*volatile*) sebanyak 85 komoditas. Sedangkan paket komoditas Kota Ternate hasil SBH 2012 sebanyak 397 komoditas, yang terdiri 148 komoditas kelompok makanan dan 249 komoditas kelompok non makanan.

Gambar 2. Indeks Harga Konsumen (IHK) Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Kelompok Pengeluaran, Tahun 2017
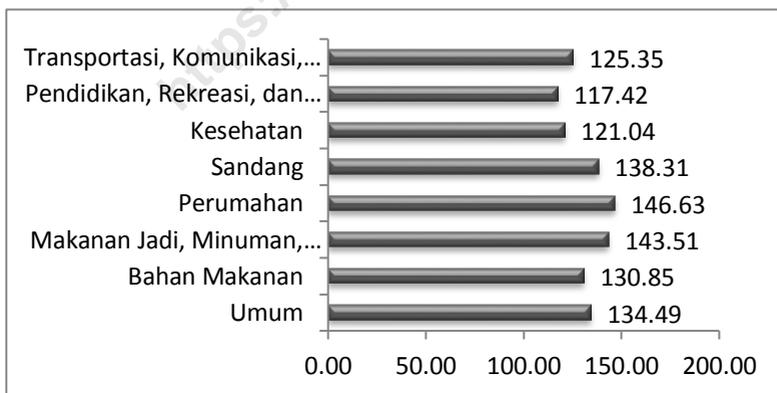
Sumber : Survei Harga Perdesaan 2017

IHK Kabupaten Halmahera Tengah pada akhir tahun 2017 adalah sebesar 134,49 yang artinya bahwa secara umum, rata-rata harga komoditas di Halmahera Tengah pada tahun 2017 telah mengalami

kenaikan sebesar 34,49 persen sejak tahun 2012 (tahun dasar). Adapun IHK masing-masing kelompok pengeluaran adalah : kelompok Bahan Makanan 130,85; kelompok makanan jadi, minuman rokok dan tembakau 143,51; kelompok perumahan 146,63; kelompok sandang 138,31; kelompok kesehatan 121,04; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 117,42; serta kelompok transportasi, komunikasi dan jasa perbankan 125,35.

Gambar 3. Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Bulan,Tahun 2017

Sumber : Survei Harga Perdesaan 2017

Kenaikan IHK tertinggi terjadi pada bulan Februari 2017 yaitu sebesar 1,42 persen dengan indeks sebesar 127,35 dimana indeks bulan sebelumnya adalah 130,64. Tingginya kenaikan IHK pada bulan Februari 2017 dipicu oleh kenaikan harga pada kelompok Perumahan yaitu sebesar 30,40 persen. Fenomena yang terjadi adalah kenaikan tarif dasar listrik. Pada semester awal 2017, terjadi transisi golongan 900VA akan dipecah menjadi 900VA subsidi dan 900VA non-subsidi. Mekanismenya adalah penyesuaian kenaikan 30% bertahap pada Januari, Maret, Mei, hingga subsidi 900 VA benar-benar dicabut pada Juli 2017.

Penurunan IHK terendah terjadi bulan Agustus 2017 dengan indeks sebesar 125,80 dimana indeks bulan sebelumnya sebesar 134,19. Penyebab turunnya IHK pada bulan tersebut antara lain karena penurunan IHK pada kelompok bahan makanan (1,73 persen) terutama pada komoditas ikan dan sayuran yang harganya karena hasil tangkapan

ikan oleh nelayan sedang melimpah dan sayur-sayuran sedang musim panen terutama yang berasal dari petani luar kota Weda seperti daerah trans kecamatan Weda Selatan dan Weda Tengah.

Tabel 5. IHK dan Laju Inflasi Halmahera Tengah Menurut Kelompok Pengeluaran, 2017

Kelompok Komoditi		2016		2017	
		IHK	Inflasi	IHK	Inflasi
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Umum		127.23	5.69	**134.49**	**5.71**
I	Bahan Makanan	124.03	3.73	**130.85**	**5.50**
II	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	135.58	9.72	**143.51**	**5.85**
III	Perumahan	125.68	6.10	**146.63**	**16.67**
IV	Sandang	133.83	9.95	**138.31**	**3.35**
V	Kesehatan	119.44	3.65	**121.04**	**1.34**
VI	Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	115.21	4.28	**117.42**	**1.92**
VII	Transportasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	134.03	4.82	**125.35**	**-6.47**

Sumber : Survei Harga Pedesaan BPS 2017

Besarnya laju inflasi Kabupaten Halmahera Tengah menurut kelompok pengeluaran, kelompok perumahan merupakan kelompok yang mengalami laju inflasi tertinggi yaitu 16,67 persen. Disusul kemudian kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 5,85 persen; kelompok bahan makanan 5,50 persen; kelompok sandang 3,35

persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 1,92 persen; kelompok kelompok kesehatan 1,34 persen, sedangkan kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 6,47 persen.

Secara umum kelompok perumahan mengalami inflasi tertinggi dikarenakan fenomena kenaikan tarif dasar listrik sepanjang tahun 2017. Kenaikan tariff dasar listrik berlangsung sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Januari 2017, bulan Maret 2017, dan Mei 2017. Selain itu, komoditas bahan bangunan juga mengalami kenaikan pada tahun 2017, seperti seng, cat, kayu balokan, papan, serta upah tukang juga mengalami kenaikan.

Di kelompok bahan makanan, penyumbang terbesar kenaikan inflasi pada kelompok ini adalah harga beras yang mengalami beberapa kali kenaikan harga sepanjang tahun 2017. Beras merupakan komoditas yang memiliki nilai andil terbesar penyumbang inflasi umum. Perubahan sedikit saja terhadap laju harganya akan sangat mempengaruhi nilai inflasi tidak hanya di kelompok bahan makanan saja melainkan juga pada nilai inflasi umum. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap fluktuasi harga beras di Halmahera Tengah, terutama pada bulan-bulan Ramadhan, lebaran, dan natal.

Sedangkan pada kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi terutama karena andil dari harga Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti bensin dan solar yang sudah mampu dikendalikan oleh pemerintah kabupaten Halmahera Tengah. Terlihat bahwa disepanjang tahun 2017, harga BBM tidak pernah naik tajam melainkan cenderung stabil dan menurun. Pembangunan POM Bensin di Weda telah mampu menekan harga BBM sehingga daya beli masyarakat atas komoditas ini masih stabil.

BAB 4
Keuangan dan Perbankan

A. KEUANGAN DAERAH

Kemampuan daerah dalam memajukan perekonomian dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sangat tergantung kepada sumber dana yang dimiliki. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Rencana dan realisasi keuangan daerah secara rinci tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun masa APBD meliputi masa satu tahun, mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. APBD terdiri dari tiga poin penting yaitu pendapatan daerah, belanja daerah (pengeluaran daerah), dan pembiayaan daerah.

Pendapatan Daerah (Penerimaan Daerah) bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, yang terdiridari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Lain-lain Pendapatan yang Sah seperti hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain akibat dari penjualan/pengadaan barang/jasa oleh daerah.

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana. Belanja daerah merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan kepemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pengeluaran daerah atau belanja daerah digunakan untuk : Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga.

Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah (pengeluaran pembiayaan). Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang deficit dan harus ditutupi dengan penerimaan

pembiayaan. Jika pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan surplus dan harus digunakan untuk pengeluaran daerah.

Setiap daerah diharapkan memiliki pendapatan yang tinggi dan dapat meningkat secara berkesinambungan, sehingga dana yang dibutuhkan untuk belanja daerah dapat tercukupi dan tidak mengalami defisit dalam arti pengeluaran lebih besar dari penerimaan yang ada. Realisasi penerimaan daerah sampai akhir tahun 2017 mencapai 695,88 milyar rupiah, sedangkan pengeluaran daerah mencapai 764,13 milyar rupiah.

Tabel 6. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (miliar rupiah), 2016-2017

Rincian		2016	2017 *)	Pertumbuhan (%)
(1)		(2)	(3)	(4)
PENERIMAAN DAERAH		**643**	**764**	18.92
Pendapatan Daerah		**642**	**696**	8.33
1	Pendapatan Asli Daerah	14	19	40.95
2	Dana Perimbangan	574	624	8.72
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	55	53	-3.92
Pembiayaan Daerah		**0**	**68**	34,313.80
PENGELUARAN DAERAH		**628**	**764**	21.66
Belanja Tidak Langsung		**248**	**289**	16.40
1	Belanja Pegawai	179	178	-0.28
2	Belanja Bunga	0	0	0.00
3	Belanja Subsidi	0	0	0.00
4	Belanja Hibah	14	10	-27.85
5	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00
6	Belanja Bagi Hasil	0	0	0.00
7	Belanja Bantuan Keuangan	55	98	77.88
8	Belanja Tidak Terduga	0	3	754.02
Belanja Langsung		**379**	**473**	24.90
1	Belanja Pegawai	31	27	-11.88
2	Belanja Barang dan Jasa	187	158	-15.30
3	Belanja Modal	161	288	78.63
Pembiayaan Daerah		**1**	**2**	100.00

Sumber : Data APBD Halmahera Tengah 2017

Otonomi daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur keuangan daerahnya harus dimanfaatkan dalam konteks memberikan pelayanan yang lebih baik, bukan dengan pembebanan pajak yang semakin meningkat yang bisa memperlambat laju pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, penerimaan daerah dalam APBD 2017 ditargetkan mengalami kenaikan dibandingkan realisasi penerimaan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 penerimaan daerah tercatat sebesar 643 miliar rupiah naik menjadi 764 miliar rupiah pada tahun 2017 atau naik sebesar 18,92 persen. Dari sisi pendapatan daerah, terlihat adanya peningkatan sebesar 8,33 persen, yaitu dari 642 miliar rupiah pada tahun 2016 ditargetkan meningkat menjadi 696 miliar rupiah pada tahun 2017. Peningkatan pendapatan banyak dipengaruhi oleh kenaikan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yaitu masing-masing nilainya sebesar 5 miliar rupiah dan 50 miliar rupiah. Sedangkan Lain-lain Pendapatan yang Sah belum secara signifikan menunjang kenaikan pendapatan daerah karena mengalami penurunan sebesar 2 miliar atau sebesar 3,92 persen.

B. PAJAK DAN RETRIBUSI

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak

daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Secara umum, menurut Dr. Mahfud Sidik, Msc. dalam artikel berjudul *'Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah'*, upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- *Memperluas basis penerimaan*

  Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

- *Memperkuat proses pemungutan*

  Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

- *Meningkatkan pengawasan*

  Hal ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

- *Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan*

  Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

- *Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik*

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.

Penerimaan pembiayaan daerah pada APBD Kabupaten Halmahera Tengah 2017 dianggarkan naik dibandingkan dengan realisasi APBD 2016, yaitu menjadi 68 miliar rupiah pada tahun 2017. Sejalan dengan hal tersebut, maka kontribusi pembiayaan terhadap penerima juga mengalami kenaikan dari 0,03 persen pada tahun 2016 menjadi 8,93 persen pada tahun 2017.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan yang harus dioptimalkan peranannya agar mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan perbaikan fasilitas umum. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD yang memadai akan menentukan tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten dalam pembangunan daerahnya sehingga tidak selalu tergantung kepada bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Salah satu langkah yang bisa ditempuh Pemerintah Daerah adalah memberikan kemudahan dalam investasi bagi pihak swasta sehingga akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kecilnya kontribusi PAD terhadap total penerimaan kabupaten/kota. Pertama, masih adanya sumber pendapatan potensial yang dapat digali oleh pemerintah kabupaten/kota, tetapi berada di luar wewenang Pemerintah Daerah tersebut. Kedua, BUMD pada umumnya belum beroperasi secara efisien. Hal ini tercermin dari laba bersih yang dihasilkan. Ketiga, rendahnya tingkat hidup dan ekonomi masyarakat, tercermin dari pendapatan perkapita. Keempat, kurang mampunya Pemerintah Daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan alternatif.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2017 terhadap total penerimaan daerah ditargetkan mengalami kenaikan dibanding PAD 2016, yaitu dari 2,14 persen menjadi 2,53 persen. Jika dilihat dari nilai nominalnya Pendapatan Asli Daerah juga mengalami kenaikan yaitu dari 14 miliar rupiah pada tahun 2016 menjadi 19 miliar rupiah pada tahun 2017 (tabel 7)

Tabel 7. Persentase Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Mneurut Jenis Penerimaan, 2016-2017

		Jenis Penerimaan	2016	2017*)
		(1)	(2)	(3)
PENERIMAAN DAERAH			100.00	100.00
Pendapatan Daerah			99.97	91.07
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2.14	2.53
	1	Pajak Daerah	0.23	0.52
	2	Retribusi Daerah	0.89	1.13
	3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0.00	0.00
	4	Lain-lain PAD yang Sah	1.02	0.88
	Dana Perimbangan		89.27	81.62
	1	Bagi Hasil Pajak	2.57	1.70
	2	Bagi Hasil Bukan Pajak	1.84	1.19
	3	Dana Alokasi Umum	68.96	60.23
	4	Dana Alokasi Khusus	15.90	18.50
	Lain-lain Pendapatan yang Sah		8.56	6.92

Sumber : Data APBD Halmahera Tengah 2017

Kreativitas pemerintah daerah melihat dan mengembangkan potensi daerah menjadi hal yang mutlak untuk menaikkan pendapatan asli daerah. Halmahera Tengah sebenarnya mempunyai banyak potensi yang dapat dikembangkan. Salah satu contoh sebagai wilayah pesisir pantai, potensi wisata bahari berpeluang sangat besar untuk dikembangkan. Kondisi lingkungan yang belum tercemar ditambah posisi Halmahera Tengah yang berdekatan dengan Kepulauan Raja

Ampat membuat nilai wisata Halmahera Tengah cukup tinggi. Pembangunan fasilitas dan akses transportasi menuju daerah wisata wajib hukumnya jika ingin mendongkrak sektor pariwisata. Tentunya tanpa melupakan promosi ke masyarakat luas, terutama melalui dunia maya.

Tabel 8. Persentase Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Jenis Pengeluaran, 2016-2017

Jenis Pengeluaran	2016	2017*)
(1)	(2)	(3)
PENGELUARAN DAERAH	100.00	100.00
Belanja Tidak Langsung	39.51	37.80
1. Belanja Pegawai	28.43	23.30
2. Belanja Bunga	-	-
3. Belanja Subsidi	-	-
4. Belanja Hibah	2.27	1.35
5. Belanja Bantuan Sosial	-	-
6. Belanja Bagi Hasil	-	0.01
7. Belanja Bantuan Keuangan	8.76	12.81
8. Belanja Tidak Terduga	0.05	0.33
Belanja Langsung	60.33	61.94
1. Belanja Pegawai	4.90	3.55
2. Belanja Barang dan Jasa	29.79	20.74
3. Belanja Modal	25.64	37.65
Pembiayan Daerah	0.16	0.26

Sumber : Data APBD Halmahera Tengah 2017

Perkembangan sektor perdagangan, hotel dan restoran di Halmahera Tengah khususnya Kota Weda memang cukup menggembirakan *(401 pedagang berlokasi di Kecamatan Weda – Data Dinas Peridagkop tahun 2016)*. Jumlah pedagang secara keseluruhan di Kabupaten Halmahera Tengah 839 pedagang, yang terdiri dari 21 pedagang besar, 108 pedagang menengah, dan 710 pedagang kecil. Dibandingkan dengan tahun 2014 jumlah pedagang di Kabupaten Halmahera Tengah mengalami penurunan, tahun 2014 terdapat 965 pedagang. Kecamatan-kecamatan yang mengalami penurunan jumlah pedagang yaitu Kecamatan Weda, Weda Utara, Pulau Gebe, Patani, Patani Utara, Patani Barat, dan Patani Timur.

Gambar 4. Banyaknya Sarana Perdagangan menurut Jenisnya, 2016
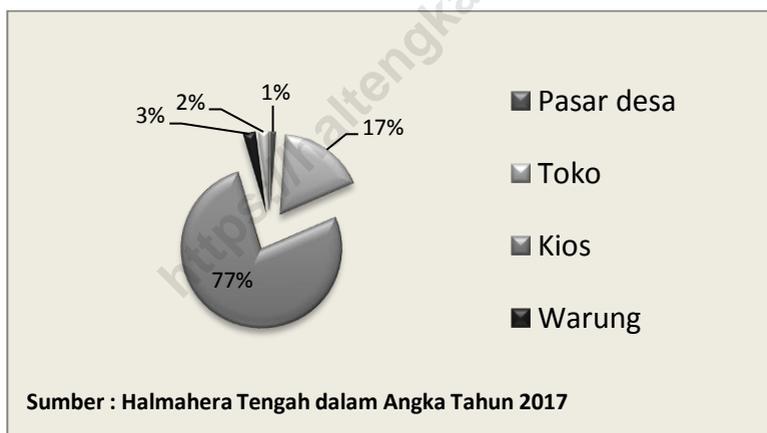
Berdasarkan data dari Dinas Perindagkop, jumlah sarana perdagangan pada tahun 2016 yaitu 1.012 sarana. Angka ini masih sama dari tahun sebelumnya.

BAB 5
Produksi

TANAMAN BAHAN MAKANAN

Sektor pertanian Kabupaten Halmahera Tengah didominasi subsektor perkebunan dan perikanan. Sementara subsektor tanaman bahan makanan seperti padi, jagung, kedelai dan sebagainya lebih banyak diusahakan penduduk pendatang (transmigran). Ada tiga lokasi transmigran di Kabupaten Halmahera Tengah yaitu di Kecamatan Weda Selatan, Weda Tengah, dan Weda Utara.

Kendala perkembangan subsektor pertanian tanaman bahan makanan berikut bisa menjadi pegangan dinas terkait dalam meningkatkan produksi pertanian yaitu: irigasi masih kurang bagus (sawah tadah hujan) mengakibatkan masa tanam hanya sekali atau maksimal dua kali dalam setahun; tingginya serangan hama tidak disertai dengan kemudahan mendapatkan pestisida, harga pupuk maupun pestisida mahal; akses transportasi masih menjadi kendala saat akan memasarkan hasil pertanian terutama di lokasi transmigran Kecamatan Weda Tengah dan Weda Utara.

Selama tahun 2015, produksi padi, baik padi sawah maupun padi ladang, mencapai 8.363 ton. Dengan luas panen 2.124 hektar, terbagi menjadi 1.058 hektar di Kecamatan Weda Selatan, 98 hektar di Weda Utara, 932 hektar di Weda Tengah, dan 36 hektar di Weda Timur. Rata-rata setiap hektar lahan tanaman padi di Halmahera Tengah menghasilkan 3,8 ton padi.

Sementara itu produksi jagung sebesar 130,4 ton selama tahun 2015, dengan luas panen 31 hektar atau rata-rata 4,2 ton per hektar.

Ubi kayu merupakan tanaman yang diminati penduduk Halmahera Tengah, karena bisa diolah menjadi sagu, yang merupakan makanan pokok penduduk lokal. Hasil panen selama tahun 2015 sebanyak 455,3ton.

Disisi lain, produksi kacang tanah selama tahun 2015 sebanyak 88,4 ton dan kedelai 13,4 ton.

Sementara itu, tanaman hortikultura yang paling banyak diusahakan selama tahun 2015 adalah cabai (32 ha), kangkung (20 ha), dan terong (19 ha).

A. PETERNAKAN

Ternak yang diusahakan di Kabupaten Halmahera Tengah terdiri dari sapi potong, kambing, babi, ayam lokal,itik, dan itik manila.

Data dari Dinas Pertanian dan Peternakan menunjukkan sebanyak 2.814 ekor sapi potong dipelihara di Kecamatan Weda Selatan, sementara itu tidak ada seekor pun sapi di Kecamantan Weda Timur, Patani, dan Patani Timur.

Berikut jumlah ternak kambing milik masyarakat di Kabupaten Halmahera Tengah berturut-turut yaitu di Kecamatan Patani Utara (1.183 ekor), Weda Selatan (998 ekor), Weda Tengah (591 ekor), Weda Utara (191 ekor), Pulau Gebe (412 ekor), Patani (1.556 ekor), Patani Barat (986 ekor), dan Kecamatan Weda (374 ekor).

Ternak ayam lokal milik masyarakat di Kabupaten Halmahera Tengah sebagian besar diternakkan di Kecamatan Weda Selatan (16.451 ekor), Patani (14.283 ekor), dan Patani Barat (13.085 ekor).

Ternak itik milik masyarakat di Kabupaten Halmahera Tengah sebagian besar diternakkan di Kecamatan Weda Selatan 1.225 ekor, Patani Barat 415 ekor, dan Patani 405 ekor.

B. PERIKANAN

Lebih dari 70 persen luas Kabupaten Halmahera Tengah adalah lautan. Maka tidaklah heran potensi perikanan, terutama perikanan laut sangatlah besar. Sampai sekarang, kegiatan perikanan masih didominasi oleh kegiatan perikanan tangkap. Tingkat pemanfaatan potensi perikanan baru mencapai angka sekitar 23 persen setiap tahunnya dari potensi lestari, sehingga peluang investasi disektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Halmahera Tengah masih sangat terbuka. Komoditas perikanan tangkap di Halmahera Tengah meliputi :

a) Ikan pelagis besar, seperti ikan tuna, cakalang, tengiri, tongkol

b) Ikan pelagis kecil, misalnya teri, kembung, layang, selar, julung

c) Ikan dermersal/ikan karang/ikan dasar, contohnya ikan kerapu, kakap merah, ekor kuning

d) Udang-udangan, meliputi lobster dan udang

e) Rumput laut

f) Teripang

g) Mutiara dan jenis molusca

Musim ikan di Halmahera Tengah terjadi antara bulan Mei hingga Agustus dengan daerah persebaran ikan dimulai dari perairan Weda, hingga ke perairan Patani dan Gebe. Keterbatasan jumlah dan jenis alat penangkap ikan yang tergolong tradisional merupakan salah satu faktor lambatnya pemanfaatan potensi perikanan karena armada tersebut hanya beroperasi di perairan lepas pantai dan tidak bisa menjangkau hingga daerah penangkapan *Zona Economy Exclusive* (ZEE). Untuk memaksimalkan produksi sektor perikanan di Kabupaten Halmahera Tengah, maka ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah seperti peningkatan sarana dan prasarana perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya, peningkatan promosi perikanan bagi investor, dan perlindungan terhadap habitat ikan.

Tabel 9. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor di Kabupaten Halmahera Tengah, 2016 dan 2017

	Kecamatan *Subdistrict*	**Perikanan Laut** *Marine Fisheries*		**Perairan Umum** *Inland Water*		**Jumlah** *Total*	
		2016	**2017**	**2016**	**2017**	**2016**	**2017**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Weda	134	204	-	-	134	204
2	Weda Selatan	71	71	2	2	73	73
3	Weda Utara	72	71	-	-	72	71
4	Weda Tengah	55	55	-	-	55	55
5	Weda Timur	56	42	-	-	56	42
6	Pulau Gebe	80	66	-	-	80	66
7	Patani	86	86	-	-	86	86
8	Patani Utara	91	91	-	-	91	91
9	Patani Barat	79	79	-	-	79	79
10	Patani Timur	80	73	-	-	80	73
	Halmahera Tengah	**804**	**838**	**2**	**2**	**806**	**840**

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Halmahera Tengah

Berdasarkan data dari Dinas Perikanan dan Kelautan, jumlah rumah tangga perikanan tangkap Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2016 sebanyak 806 rumah tangga yang terdiri dari 804 rumah tangga di sektor perairan laut dan 2 rumah tangga di sektor perairan umum. Terdapat 245 rumah tangga yang bekerja di sektor budidaya perikanan, Kecamatan Weda Selatan (64 ruta), Weda (43 ruta), Pulau Gebe (16 ruta), Patani Barat (4 ruta), Patani Utara (11 ruta), Weda Utara (4 ruta), Weda Tengah (95 ruta), dan Patani Timur (2 ruta).

Menurut data dari Dinas Kelautan dan Perikanan, selama tahun 2017, jumlah perahu tanpa motor yang ada di Halmahera Tengah adalah 404 buah. Sedangkan jumlah motor tempel sebanyak 634 buah. Berikutnya , jumlah kapal motor sebanyak 47 buah.

C. PERKEBUNAN

Perkebunan sebagai bagian integral dari sektor pertanian merupakan salah satu sub sektor yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Peranannya terlihat nyata dalam penerimaan devisa negara melalui ekspor, penyediaan lapangan kerja, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku berbagai industri dalam negeri, perolehan nilai tambah dan daya saing serta optimalisasi sumber daya alam secara berkelanjutan.

Komoditas utama sektor perkebunan di Halmahera Tengah adalah kelapa, pala, cengkeh, dan kakao. Hasiltanaman perkebunan sebagian besar di-ekspor keluar Kabupaten Halmahera Tengah.

Pada tahun 2015, hasil tanaman perkebunan yang dominan di Kabupaten Halmahera Tengah yaitu kelapa dan pala. Jumlah produksi kelapa mencapai 8.757,80 ton dengan luas tanam 10.246 hektar, dan produksi pala sebesar 1.809,80 ton dengan luas tanam 11.098,50 hektar.

Sementara itu, luas perkebunan cengkeh selama tahun 2015 adalah 1.490 hektar dengan produksi mencapai 204,2 ton. Untuk tanaman kakao, luas tanam sebesar 3.436 hektar dengan jumlah produksi mencapai 418 ton pada tahun 2015.

Di tahun 2015, dari 10 kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah, Kecamatan Patani Utara merupakan wilayah produksi terbanyak tanaman pala (3.119 ton), kelapa (1.867 ton), dan cengkeh (756 ton). Sedangkan produksi kakao terbanyak berasal dari Kecamatan Patani Barat.

D. KEHUTANAN

Sebagian besar lahan di Kabupaten Halmahera Tengah adalah areal hutan. Kawasan hutan Halmahera Tengah termasuk dalam *Low Land Forest* (hutan pegunungan rendah) dengan komposisi jenis pohon dihutan primer maupun di hutan bekas tebangan dan memiliki potensi keanekaragaman hayati yang cukup tinggi, baik flora maupun fauna.

Menurut data dari Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Tengah, pada tahun 2017, luas kawasan hutan mencapai 178.887,08 hektar, dengan rincian sebagai berikut :

1. Hutan Produksi : 134.091,76 Ha
2. Hutan Produksi Terbatas : 59.990,66 Ha
3. Hutan Produksi Konversi : 54 390,96 Ha
4. Hutan Lindung : 28 756,31 Ha
5. Taman Nasional Aketajawe : 16.037,95 Ha
6. Air/danau : 839,65 Ha

Realisasi pembayaran provinsi sumber daya hutan (PSDH) dari seluruh perusahaan yang beroperasi pada tahun 2015 mencapai 1,6 milyar rupiah.

Tabel 10. Produksi Kayu Bulat di Halmahera Tengah (m³) Dirinci per bulan Tahun 2015

Bulan	Produksi (m3)
(1)	(2)
1. Januari	-
2. Februari	-
3. Maret	-
4. April	-
5. Mei	6 451,80
6. Juni	4 658,37
Bulan	Produksi (m3)
(1)	(2)

7. Juli	2 344,95
8. Agustus	3 402,38
9. September	1 101,24
10. Oktober	4 568,14
11. November	3 085,87
12. Desember	701,15
Jumlah	26 313,90

Sumber : Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Tengah, 2015

Realisasi produksi kayu bulat berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Tengah selama tahun 2015 mencapai 26.313,90 m^3. Kelompok kayu rimba adalah yang terbesar produksinya (14.559,76 m^3), diikuti oleh kelompok kayu meranti campuran (11.754,14 m^3).

BAB 6
Akomodasi dan Pariwisata

AKOMODASI DAN PARIWISATA

Potensi pariwisata di Kabupaten Halmahera Tengah didominasi wisata bahari karena kabupaten ini sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pesisir pantai. Berikut adalah beberapa tempat wisata di Kabupaten Halmahera Tengah :

1. Talaga Nusliko

   Merupakan danau air payau di Desa Nusliko Kecamatan Weda. Berjarak 1,5 km di sebelah selatan dari pusat kota Weda. Luas danau ini mencapai 4 km^2, dikelilingi bukit, dan dapat digunakan untuk bersantai, memancing dan lain sebagainya. Pengunjung bisa menggunakan transportasi darat seperti mobil atau ojeg.

2. Pulau Imam dan Pulau Dua

   Adalah pulau didepan kota Weda, tepatnya didepan pelabuhan Weda, yang berjarak 500 meter dari pelabuhan. Di pulau Imam, terdapat kuburan penduduk dan kuburan leluhur yang dikeramatkan dan biasanya banyak dikunjungi oleh peziarah.

3. Pulau Mnaili dan Pulau Yefi

   Pulau Mnaili dan Pulau Yefi terletak disamping pulau Imam. Pulau kecil yang tidak berpenghuni ini dikelilingi laut dangkal yang tenang dan dapat digunakan untuk memancing, *snorkling* dan lain sebagainya.

4. Taman Laut Tanjung Ulie

   Terletak di Desa Lelilef Sawai Kecamatan Weda Tengah. Berjarak 27 km dari Kota Weda, dapat ditempuh dengan jalan darat maupun lewat laut. Taman laut ini berdekatan dengan lokasi perusahaan tambang PT. Weda Bay Nickel. Hamparan terumbu karang yang masih terjaga kelestariannya serta ikan yang bewarna-warni memanjakan wisatawan yang berkunjung ke sana.

5. Taman Laut Pasi Gurango dan Pasi Dua

   Berjarak 40 km dari pusat kota Weda. Terletak di Desa Sagea, Kecamatan Weda Utara. Dapat ditempuh melalui jalur laut maupun darat kurang lebih 1,5 jam perjalanan. Pasi Gurango dan Pasi Dua merupakan pulau karang kecil dengan diameter sekitar 5 meter dan dikelilingi laut dangkal yang memiliki hamparan terumbu karang sepanjang 500 meter yang beraneka warna. Pengunjung juga disuguhi pemandangan biota laut yang menawan dan masih alami.

6. Talaga Legaye Lol (Yonelo)

   Merupakan sebuah danau air payau yang terletak di kaki bukit Legaye Lol disebelah barat desa Sagea, Kecamatan Weda Utara. Panjang danau ini sekitar 2,5 km dan lebarnya 2,4 km. Ditengah danau terdapat pulau kecil bernama Yefi. Di dasar danau banyak terdapat kerang berprotein tinggi. Di ujung danau terdapat sebuah makam yang konon merupakan makam keturunan kesultanan Jailolo yang bernama Muhammad Taher.

7. Gua Boki Moruru

   Merupakan sebuah gua alam dihulu sungai Sageyen, berjarak sekitar 5 km dari Desa Saga, Kecamatan Weda Utara. Pengunjung biasanya menempuh perjalanan menyusuri sungai Sageyen dengan menaiki perahu kecil atau biasa disebut *katinting* dengan lama perjalanan 30 menit. Nama gua ini diambil dari nama seorang putri yang konon pernah bermukim di kawasan ini. Boki Moruru berarti putri yang menghanyutkan diri. Menurut cerita masyarakat setempat, di sungai Sageyen pernah ditemukan seorang putri dari Kesultanan Tidore yang sedang mandi dan bermain-main sambil menghanyutkan diri mengikuti arus sungai Sageyen hingga kehilir sungai.

8. Pulau Mtum Ya

   Adalah sebuah pulau kecil yang terdiri dari hamparan pasir putih sepanjang 142 meter dan lebar 67 meter. Di dasar lautnya terdapat hamparan terumbu karang yang unik dan eksotik, serta ikan yang cantik menawan. Pengunjung harus menempuh perjalanan selama 2 jam dengan transportasi speedboat menuju Desa Messa, Kecamatan Weda Utara, kemudian baru menuju ke pulau ini dengan katinting dengan lama perjalanan kurang lebih 15 menit.

9. Tanjung Ngolo Popo dan Selat Jailolo

   Merupakan sebuah tanjung yang terbentuk dari batu cadas (batu rijang), berlokasi di Desa Kipai, Kecamatan Patani. Tanjung ini berjarak 0,90 mil dari Desa Kipai. Di tanjung ini terdapat makam yang dikeramatkan dan sering dikunjungi peziarah. Sedangkan selat Jailolo memiliki hamparan terumbu karang yang masih alami di dasarnya.

10. Pulau Moor

    Adalah sebuah pulau kecil dengan hamparan pasir putih. Berjarak kurang lebih 1 mil dari desa Kipai, Kecamatan Patani dan dapat ditempuh menggunakan transportasi laut dengan lama perjalanan 30 menit. Panjang pulau ini kurang lebih 2 km. Didekat pantai Pulau Moor, terdapat sebuah danau yang dikelilingi oleh hutan bakau. Pulau ini bagus dijadikan tempat memancing atau *camping*.

11. Pulau Lewo dan Pulau Sayafi

    Letaknya tidak jauh dari pantai Patani Utara. Panjang kedua pulau ini kurang lebih 3 km. Pulau ini digunakan sebagai lokasi perkebunan kelapa oleh masyarakat. Dapat digunakan pengunjung untuk memancing atau *camping*.

12. Kepulauan Gebe

    Merupakan sebuah gugusan pulau yang terdiri dari Pulau Gebe, Pulau Fau, Pulau Yoi, Pulau Uta dan Pulau Sain. Berbatasan langsung dengan Kepulauan Raja Ampat yang sangat terkenal dengan wisata bawah lautnya disebelah timur dan selatan. Untuk dapat mengunjungi kepulauan ini, dapat ditempuh dengan perjalanan laut maupun udara. Pulau Yoi merupakan salah satu pulau penghasil kepiting. Di Pulau ini terdapat penangkaran kepiting (ketang kenari) dan ikan yang diusahakan oleh masyarakat setempat. Sedangkan pantai di Pulau Uta sering digunakan penyu sebagai tempat bertelur dimalam bulan purnama.

Selain terdapat banyak tempat wisata bahari, Halmahera Tengah juga kaya akan wisata budaya. Berikut beberapa contoh wisata budaya di Halmahera Tengah :

1. Coka Iba dan Fanten

   Merupakan sebuah rangkaian atraksi budaya yang kerap diadakan oleh masyarakat Weda, Patani dan Gebe pada saat bulan Rabi'ul Awal. Dizaman kesultanan, coka iba merupakan pasukan elit gam range yang ditugaskan menyamar menggunakan topeng. Kini coka iba menjadi sebuah atraksi budaya yang dilakukan pada saat perayaan fanten. Dalam menjalankan atraksinya, para pelaku coka iba menggunakan topeng menyerupai setan, menari diiringi tabuhan rebana dan alunan zikir. Coka iba merupakan perlambang atas kegembiraan alam termasuk setan dan iblis yang turut bersuka cita atas

kelahiran Nabi Muhammad SAW. Fanten merupakan sebuah perayaan yang bermakna saling memberi tanpa pamrih dengan tujuan memupuk rasa persaudaraan antar sesama masyarakat gam range (tiga negeri). Konon, diawal perayaannya, melahirkan sumpah leluhur gam range yang terkenal dengan slogan fagogoru. Dalam perayaan fanten, masyarakat secara bergantian menyajikan makanan untuk disantap oleh saudaranya yang kemudian akan dibalas oleh saudara keesokan harinya dengan menyediakan hidangan yang sama. Puncak perayaan fanten adalah pada tanggal 12 Rabi'ul Awal.

2. Tari Lala

   Tarian ini merupakan tarian perang yang sering dimainkan masyarakat gam range. Melambangkan keperkasaan angkatan perang gam range pada saat menaklukan musuh kerajaan.

Ketersediaan jasaa komodasi (hotel) yang memadai berperan penting dalam menunjang industri pariwisata. Sebagai daerah yang baru berkembang, pada tahun 2016 tersedia 14 akomodasi di Kabupaten Halmahera Tengah, dengan jumlah kamar 142 dan tempet tidur sebanyak 242 dan rata-rata tamu yang menginap selama 7 hari. Kebanyakan tamu yang menginap masih tamu domestik. Penginapan ini tersebar di Kecamatan Weda, Weda Selatan, Weda Tengah, dan Pulau Gebe.

BAB 7
Transportasi

TRANSPORTASI DARAT DAN LAUT

Gambar 5. Peta Kabupaten Halmahera Tengah
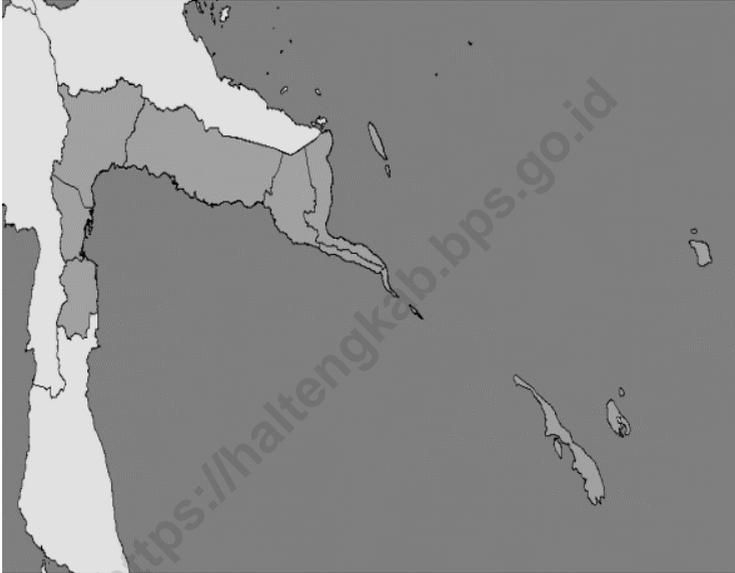
Sumber : Statistik Transportasi Kabupaten Halmahera Tengah 2017

Kabupaten Halmahera Tengah merupakan daerah kepulauan dimana lebih dari 80 persen desa terletak di pesisir pantai. Kondisi transportasi darat yang belum menjangkau semua kecamatan di Halmahera Tengah mengakibatkan transportasi laut menjadi andalan mobilitas penduduk dari daerah satu ke daerah lain. Moda transportasi laut di Kabupaten Halmahera Tengah meliputi kapal motor, kapal kayu dan *speed boat*.

Selain sebagai alat transportasi penumpang, moda transportasi laut juga sebagai alat pemasok berbagai barang kebutuhan masyarakat seperti bahan bakar (solar, bensin, minyak tanah), semen, beras, dan sebagainya. Ekspor berbagai macam hasil perkebunan dan kehutanan masyarakat Halmahera Tengah seperti kopra, kayu, bahkan nikel juga dilakukan melalui jalur laut.

Jalan merupakan sarana transportasi darat yang sangat penting untuk memperlancar aktivitas ekonomi. Kondisi jalan yang baik akan

mempermudah mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari suatu wilayah ke wilayah lain. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Tengah, pada tahun 2017 sekitar 53,24 persen jalan di Halmahera Tengah dengan kondisi baik. Persentase panjang jalan dengan kondisi sedang adalah 25,60 persen. Adapun persentase panjang jalan dengan kondisi rusak adalah 7,65 persen serta sisanya 13,51 persen dengan kondisi rusak berat.

Pada tahun 2016, 17,26 persen dari seluruh jalan di kabupaten Halmahera Tengah atau sepanjang 67 km jalan masih berstatus jalan negara sedangkan pada tahun 2017 status seluruh jalan kabupaten sudah menjadi jalan kabupaten.

Gambar 6. Persentase Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Halmahera Tengah, 2017

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Halmahera Tengah

Pada tahun 2017, status seluruh jalan di Kabupaten Halmahera Tengah telah menjadi jalan kabupaten dengan panjang jalan sepanjang 406,08 km. Berdasarkan panjang jalan tersebut, panjang jalan kabupaten yang permukaannya telah diaspal adalah sekitar 181,68 km atau sekitar 44,84 persen dari total panjang. Adapun panjang jalan kabupaten yang permukaannya kerikil yaitu sekitar 156,07 km atau sekitar 38,51 persen, sedangkan sisanya sekitar 67,47 km atau 16,65 persen masih berupa tanah.

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Halmahera Tengah, jumlah kendaraan truk yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah pada tahun 2017 sebanyak 67 truk. Jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu sebanyak 71 truk. Dari jumlah tersebut, 7 di antaranya merupakan milik perorangan sedangkan 60 truk milik perusahaan. Adapun transportasi umum yang mayoritas dipakai oleh masyarakat di Halmahera Tengah adalah mobil penumpang yang kepemilikannya sebagian besar adalah milik pribadi sehingga tidak tercatat di Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.

Transportasi Udara

Bandar Udara Gebe merupakan Bandar Udara Kabupaten Halmahera Tengah yang terletak di Kecamatan Pulau Gebe. Bandar Udara Gebe beroperasi sejak tahun 1978 dengan jumlah maskapai hanya satu maskapai. Bandar Udara Gebe mulai beroperasi pada bulan Februari setiap tahunnya karena setiap bulan Januari masih dalam proses pelelangan maskapai yang akan beroperasi selama satu tahun ke depan.

Pada tahun 2017, jumlah penerbangan di Bandara Gebe adalah sebanyak 201 penerbangan dengan rata-rata 17 penerbangan setiap bulan. Jumlah penerbangan tertinggi terjadi pada bulan Juli yaitu 29 penerbangan.

Jumlah penumpang pesawat pada tahun 2017 adalah 2.049 orang. Jumlah penumpang tertinggi terjadi pada bulan Juli yaitu 288 orang sedangkan jumlah penumpang terendah terjadi pada bulan April yaitu 98 orang. Adapun banyaknya bagasi dan kargo pada tahun 2017 masing-masing adalah 112.873 kg dan 1.006 kg.